KR-Driyanto

Pendapa rumah dinas wakil bupati Banyumas di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto.

Pinjam Pendapa Wabup, Gratis

BANYUMAS (KR) - Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mempersilakan kepada warga Banyumas yang akan menggelar hajatan tapi tidak memiliki ruangan, untuk memanfaatkan pendapa rumah dinas wakil bupati di Jalan Jenderal Sudirman tanpa dipungut biaya alias gratis. "Pendapanya gratis. Tapi bensin dan perlengkapan lainnya seperti dekor, konsumsi ya ditanggung yang akan hajatan," kata Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Jumat (21/8).

Selain menggratiskan sewa, Wabup Banyumas juga siap menjadi saksi pernikahan saat dirinya sedang ada di rumah dinas. Menurutnya ia mempersilakan warga menggunakan pendapa rumdin wabup untuk acara pernikahan, dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ini, banyak warga Banyumas bingung dan tak mampu menyewa gedung untuk acara pernikahan.

Dijelaskan di ruang pendapa wabup, sudah ada perlengkapan seperti kursi, sound system dan fasilitas cuci tangan. "Di pendapa diberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak," tegasnya. Pendapa rumah dinas wabup Banyumas berkapasitas 100 kursi.

Warga yang akan pinjam pendapa, jauh-jauh hari diharap mendaftar ke sekretariat wakil bupati. Durasi penggunaan pendapa, 2-3 jam. Tidak boleh mendirikan tenda tambahan. Selain menggratiskan pandapa, Sadewo juga meminjamkan mobil pengantin berupa Toyota Alphard lengkap dengan sopir. Jika Alphard sedang dibawa pergi, disediakan pula mobil mewah jenis lain. **(Dri)-d**

Didominasi Kandidat Luar Daerah

KENDAL (KR) - Ada yang menarik dari dinamika Pilkada Kabupaten Kendal. Nama-nama bakal calon yang muncul, didominasi tokoh dari luar Kendal. Beberapa nama bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kendal yang berasal dari luar daerah di antaranya Bacabup Tino Indra Wardono, Ketua KNPI Jateng warga asli Kota Semarang.

Selain itu, Bacabup Dico Mahtado Ganinduto yang merupakan politisi Partai Golkar kelahiran Jakarta. Dico direncanakan akan bergandengan dengan Windu Suko Basuki yang asli warga Kota Semarang kelahiran Wonogiri. Ditambah bakal calon wakil bupati Rintang Bramantya yang juga warga Kota Semarang.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Mastur mengatakan, kandidat dari luar daerah tidak menyalahi Undang Undang.

"Boleh dan sah-sah saja calon dari luar wilayah. Sepanjang masih tercatat warga Indonesia, sehat jasmani dan rohani. Selain itu setia kepada Pancasila, UUD Tahun 1945 dan NKRI. Jadi sekarang tidak harus warga setempat di daerah pemilihan," ujar Mastur, Jumat (21/8), sambil menegaskan, hal itu tak perlu dipersoalkan sepanjang calon tersebut memiliki kemampuan dan membawa Kendal bisa lebih baik. "Hal ini seharusnya menjadi pemicu putra daerah Kendal untuk menunjukkan kemampuannya memimpin dan memperbaiki Kendal," tegasnya.

Hal senada dikatakan Ali Imron, tokoh masyarakat Kaliwungu. "Jika dipimpin orang luar Kendal, butuh waktu lama untuk menyesuaikan. Sebab harus belajar geografis, kultur masyarakatnya, ekonomi masyarakatnya dan sebagainya," papar Ali. **(Ung)-d**

Likuiditas ..... Sambungan hal 1

lain terkait social safety net. "Kami akui memang belum terlihat peningkatan kredit yang signifikan di DIY saat ini. Sehingga perlu sinergi dan kerja sama antara pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, industri keuangan dan sektor riil," kata Jimmy,

Dia menyatakan, danya program penjaminan dari pemerintah melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo memberikan rasa aman bagi industri keuangan dan debitur untuk menyalurkan kredit/pembiayaan. "Kami melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana yang ditempatkan di bank umum mitra dengan meminta bank membuat pipeline usaha yang akan dibiayai dari dana dimaksud," ungkap Jimmy.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Hilman Tisnawan menegaskan dari sisi lembaga intermediasi, tekanan pada stakeholder korporasi maupun rumah tangga masih dapat diantisipasi perbankan di DIY. Namun begitu, tingkat intermediasi perbankan masih cenderung rendah, baik dari sisi kredit maupun DPK. Hal ini berdampak pada rentabilitas perbankan, meski tingkat risiko masih dalam kategori rendah.

Dia menyatakan, secara umum sumber kerentanan perbankan di DIY disebabkan dependensi yang tinggi pada sektor rumah tangga. Perbankan DIY memiliki 77,38 persen pendanaan dari rumah tangga dan 72,62 persen pembiayaan kepada rumah tangga di DIY.

Sekalipun kinerja perbankan mengalami tekanan pada semester l tahun ini, namun Hilman menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab kondisi likuiditas perbankan saat ini lebih dari cukup, sehingga memiliki kapasitas untuk melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19 maupun melakukan pembiayaan pada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. **(Ira/Dev)-d**

3.094 UMKM AkanTerima Bantuan Modal

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 3.094 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sukoharjo lolos verifikasi tahap pertama dan dipastikan menerima bantuan program stimulus modal usaha sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat.

Jumlah tersebut tertinggi di Solo Raya dan nomor tiga se-Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap 4.294 UMKM dan Kabupaten Banyumas 3.497 UMKM.

Penerima bantuan UMKM Sukoharjo masih bisa bertambah karena sekarang masih verifikasi tahap kedua. Pencairan dana dilakukan melalui transfer rekening masing-masing UMKM penerima bantuan mulai 24 Agustus.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo, Jumat (21/8), mengatakan, lebih dari 22 ribu pelaku UMKM mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan program stimulus modal usaha sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat. Rinciannya, 8 ribu UMKM mendaftar tahap pertama dan sisanya tahap kedua.

Dari sebanyak 8 ribu UMKM yang mendaftar tahap pertama tersebut, 3.094 UMKM di antaranya lolos verifikasi dan mendapat bantuan stimulus modal usaha dari pemerintah pusat.

Sebanyak 3.094 UMKM calon penerima bantuan sudah mendapatkan sosialisasi dari petugas terkait stimulus modal usaha yang akan diterima. Dana akan dicairkan melalui rekening masing-masing UMKM penerima bantuan mulai 24 Agustus. "Pemerintah pusat sudah menunjuk bank untuk menyalurkan dana bantua modal bagi UMKM," ujar Sutarmo.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo lega setelah banyak UMKM lolos verifikasi dan mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah pusat. Sebab, dikatakan Sutarmo jumlah UMKM di Sukoharjo sangat besar dan memerlukan bantuan menghadapi pandemi Covid-19.

Sutarmo mengatakan, jumlah pendaftar UMKM dalam progran bantuan stimulus modal usaha sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat di Sukoharjo sangat banyak.

Tingginya peminat dikarenakan banyak pelaku UMKM membutuhkan modal usaha setelah terdampak pandemi virus Korona.

Total ada 22.156 UMKM di Sukoharjo bergerak di berbagai bidang usaha sudah mendaftarkan diri mendapat bantuan modal dari pemerintah pusat. Pendaftar tersebut berasal dari tahap pertama 8.000 pendaftar dan sisanya baru mendaftar di tahap kedua.

KLB Diperpanjang

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, mengatakan, status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Korona saat ini masih berlaku hingga 31 Agustus. KLB diberlakukan mengingat masih tingginya kasus positif virus Korona. Pemkab Sukoharjo belum melakukan pencabutan hingga seluruh kasus tuntas.

Meski belum berakhir, namun Pemkab Sukoharjo berencana akan memperpanjang kembali status KLB virus Korona selama satu bulan ke depan hingga 30 September. Pertimbanganya karena faktor terus bertambahnya kasus positif virus corona.

Pemkab Sukoharjo sedang melakukan persiapan perpanjangan status KLB virus Korona tersebut. Bentuknya yakni dengan berencana membuat Surat Keputusan (SK) perpanjangan sebagai dasar diberlakukan KLB virus Korona.

"Kasus positif virus Korona di Sukoharjo belum turun, bahkan terus naik. Pertimbangan itu membuat status KLB virus Korona akan diperpanjang hingga September mendatang," ujarnya. **(Mam)-d**

KOMUNITAS KANCA NDALEM BUGISAN

Bagikan Seribu Bungkus Nasi

YOGYA (KR) - Komunitas Kanca Ndalem Bugisan RW 06, Patangpuluhan, Yogyakarta, Jumat (21/8) membagikan nasi gratis kepada masyarakat. Jika biasanya hanya sekitar 200 bungkus nasi, kali ini komunitas membagikan seribu bungkus dan semuanya merupakan donasi dari warga RW 06 Bugisan dan sekitarnya.

"Kami membagikan seribu bungkus, dalam rangka merayakan kemerdekaan RI ke-75. Jika biasanya nasi hanya dibagikan kepada masyarakat yang lewat Bugisan, kali ini juga didistribusikan ke sejumlah panti asuhan dan pondok pesantren," kata Ketua Komunitas Kanca Ndalem Bugisan Diko Fitriandito di sela acara.

Adapun lembaga yang menerima sumbangan antara lain, Panti Asuhan Aisyiyah Yogyakarta, Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Yogyakarta, dan Panti Asuhan Mustika Tama Bantul. Kemudian Panti Sosial Tresna Wredha Bantul, Sahabat Yatim Bugisan dan Panti Asuhan Bina Siwi Pajangan Bantul. Selain itu Panti Asuhan Gotong Royong, Ponpes Al Imdad Pajangan dan Ponpes Miftachudin Pandak Bantul.

Komunitas ini mulai berbagi pada masyarakat yang membutuhkan sejak bulan Ramadan yang lalu. Awalnya hanya untuk meringankan beban masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19, tetapi kemudian dilakukan secara rutin seminggu sekali dan menjadi sedekah Sega Jumat.

Lurah Patangpuluhan Sigit Harto Budiono SE menyampaikan apresiasi kepada warganya yang memiliki kepedulian kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Pada kesempatan itu juga hadir aparat dari Koramil 10 Wirobrajan, Polsek Wirobrajan, Pagu-yuban Pasukan Cakruk RW 05 dan Ketua Kampung Patangpuluhan.

KR-Widyo Suprayogi

Lurah Patangpuluhan bersama aparat dari Polsek dan Koramil 10 Wirobrajan membagikan nasi bungkus.

Sigit juga mendukung kegiatan tersebut karena sangat positif. "Kegiatan ini menarik karena ada unsur memberdayakan masyarakat. Dimana nasi bungkus yang dibagikan dipesan dari warga setempat, sehingga unsur kepeduliannya sangat tinggi, " tuturnya. **(Ogi) -d**

PPN ..... Sambungan hal 1

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif lain bagi industri media massa baik konvensional maupun digital. Antara lain, pengurangan beban listrik dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar kepada PLN.

Ia menjelaskan selama ini industri media massa mempunyai kewajiban untuk membayar minimum tagihan meskipun penggunaan listriknya jauh lebih kecil ketika operasi usaha sedang menurun seperti dalam masa Covid-19.

"Listriknya dikurangi dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. Ini kita terapkan tidak hanya untuk media tapi juga industri bisnis dan sosial," jelasnya.

Sedangkan untuk penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media massa saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih dalam proses penyelesaian.

"PP-nya sedang dalam proses penyelesaian. Semoga dapat ditunda sampai Desember sehingga bisa meringankan," tuturnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan ia belum dapat memberikan keputusan mengenai insentif berupa BPJS Kesehatan bagi industri media massa. Pasalnya kondisi BPJS Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan.

Sri Mulyani meyatakan, pemerintah turut menurunkan pajak penghasilan (PPh) menjadi 50 persen untuk pembayaran masanya. "Kita lakukan ini dalam rangka merespons kebutuhan masing-masing industri yang secara spesifik pasti memiliki kondisi tertentu," ujarnya. **(Ant/Lmg)-d**

Gedung ..... Sambungan hal 1

pengendara yang berhenti di lampu merah dekat gedung itu sempat melihat jilatan api yang membakar gedung tersebut. Hingga pukul 21.00 api masih berkobar.

Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan *sky lift* agar api di lantai enam segera dipadamkan dan api tidak menyebar ke ruangan lain.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. "Iya benar," kata Hari, semalam.

Namun pihaknya tidak merinci lantai atau ruangan apa yang terbakar. Polisi menyebut ruangan gedung yang kebakaran yakni di lantai 4,5 dan 6 yang merupakan ruang kepegawaian. **(Ant/Obi)-d**

Pelaku ..... Sambungan hal 1

"Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi, akhirnya Sabtu (22/8) pukul 04.00 WIB pelaku HT berhasil kami tangkap di rumahnya, wilayah Kecamatan Baki, beserta sejumlah barang bukti," jelas AKBP Bambang Yugo.

Menurut keterangan sejumlah saksi, pelaku dan korban punya hubungan dekat dalam usaha rental mobil. "Motif pelaku melakukan pembunuhan, karena masalah utang kepada pihak lain, yang jumlahnya cukup banyak. Pelaku ingin menguasai harta korban untuk membayar utang. Aksi pembunuhan berlangsung Rabu (19/8) dini hari, namun baru diketahui warga sekitar, Jumat (21/8) malam. "Sebelum melakukan aksinya, pelaku singgah di rumah korban. "Pelaku melakukan aksinya menggunakan pisau dapur di rumah korban. Soal inisiatif membunuh istri dan dua anak korban, masih kami dalami," tegas Kapolres.

Disinggung soal pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku, Kapolres menegaskan polisi masih melakukan pendalaman. Sebab dari hasil pemeriksaan sementara diketahui keterangan pelaku mengambil sendiri pisau di dapur rumah korban sebelum melakukan aksi pembunuhan. Usai melakukan aksi pembunuhan, pelaku mengambil harta korban berupa mobil dan menggadaikan kepada orang lain senilai Rp 82 juta.

Uang tersebut sudah ditransfer oleh pembeli ke rekening pelaku, namun mobil korban belum sampai diserahkan, karena pelaku telah ditangkap petugas Polres Sukoharjo. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya baju pelaku, pisau, BPKB dan satu unit mobil korban. "Pelaku dijerat Pasal 365 junto 338 dan 340 dengan hukuman maksimal seumur hidup," jelas Kapolres didampingi Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Nanung. **(Mam)-d**

Bertambah ..... Sambungan hal 1

"Tambahan kasus positif Covid-19 tersebut dari kasus 1169 sampai dengan kasus 1183. Kasus terkonfirmasi ini berdomisili masing-masing 5 orang dari Bantul dan Gunungkidul, Sleman empat kasus serta Kota Yogyakarta sebanyak 1 kasus," kata Berty di Yogyakarta, Sabtu (22/8).

Dia menyampaikan riwayat penularan awal kasus terkonfirmasi tersebut dari hasil skrining karyawan kesehatan sebanyak 4 kasus, kontak tracing kasus positif Covid-19 sebanyak 6 kasus dan masih dalam penelusuran sebanyak 5 kasus.

Sedangkan kasus meninggal 1 kasus, yaitu kasus 942 perempuan (53) warga Bantul dengan komorbid kanker payudara. Dengan demikian total kasus meninggal ter-konfirmasi menjadi sebanyak 33 kasus.

"Jumlah kasus sembuh sebanyak 15 kasus maka total kasus sembuh menjadi sebanyak 808 kasus di DIY. Tambahan kasus sembuh ini berdomisili di Kota Yogyakarta sebanyak 3 kasus, Bantul 1 kasus, Kulonprogo 3 kasusl, Gunungkidul 2 kasus dan Sleman 6 Kasus," tuturnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY tersebut menambahkan jumlah sampel diperiksa sebanyak 449 sampel dari 349 orang.

Dari laporan harian suspek mencapai 11308 orang dengan 1178 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sebanyak 808 orang di antaranya sembuh, 33 orang meninggal terkonfirmasi dan 337 orang kasus aktif.

"Case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan sebanyak 68,59 persen dan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2,80 persen di DIY," ungkap Berty. Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Noviar Rahmad menyatakan,mulai dibukanya sejumlah objek wisata di DIY sedikit banyak berdampak pada kenaikan jumlah pendatang di DIY.

Sekalipun sejumlah objek wisata dan fasilitas publik sudah berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ada anggota masya-rakat yang belum menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar penularan Covid-19 bisa diantisipasi sejak dini.

"Selain melakukan penindakan kepada pengunjung atau wisatawan yang melakukan pelanggaran, kami juga terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Walaupun dalam realitanya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, karena masih ditemukan adanya pelanggaran. Edukasi terus kami lakukan dengan harapan muncul kesadaran dari masyarakat khususnya dalam kedisiplinan protokol kesehatan," papar Noviar.

Dia menambahkan, Satpol PP DIY bekerja sama dengan Pemkot Yogya, sudah menurunkan sebanyak 350 personel di Kawasan Malioboro. Para personel tersebut terdiri dari gabungan Satpol PP, Jogoboro, TNI/Polri, Paksikaton dan Pambudaya dengan total 350 personel setiap hari. Tugas mereka melakukan penindakan sesuai dengan Perwal No 51 tahun 2020. **(Ira/Ria)-d**